

**BIAYA TRANSAKSI USAHA PERIKANAN SKALA KECIL  
DI KABUPATEN CILACAP**  
*Transactional Cost of Small Scale Fisheries in Cilacap District*

**\*Andreas D. Patria<sup>1</sup>, Luky Adrianto<sup>2</sup>, Tridoyo Kusumastanto<sup>2</sup>,  
M. Mukhlis Kamal<sup>2</sup> dan Rokhmin Dahuri<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Pascasarjana Program S3 Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB

<sup>2</sup>Staff Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB

\*email: ad\_patria@yahoo.com

Diterima 14 Agustus 2014 - Disetujui 3 Nopember 2014

**ABSTRAK**

Efisiensi ekonomi sering kali hanya diukur dari aspek produksi, dan kurang memperhatikan segi non-produksi seperti biaya transaksi. Dalam usaha penangkapan ikan skala kecil, banyak sekali pengeluaran di luar biaya produksi yang ditanggung oleh nelayan. Pengeluaran ini disadari atau tidak telah mengurangi tingkat penerimaan dari usaha penangkapan ikan skala kecil. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghitung komponen biaya transaksi pada usaha penangkapan ikan skala kecil di Kabupaten Cilacap, serta mengukur dan menganalisis pengaruh biaya transaksi terhadap efisiensi ekonomi usaha. Penelitian dilakukan dengan metode survei dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen biaya transaksi terbesar adalah raman dari hasil tangkapan yang dilelang pada Tempat Pelelangan Ikan berkisar antara 45 % dari total biaya transaksi yang dikeluarkan. Rasio biaya transaksi terhadap penerimaan yang diperoleh nelayan skala kecil menunjukkan bahwa setiap penerimaan Rp 100 maka sebesar Rp 26 dinikmati oleh pihak lain walaupun sebagian dari biaya transaksi tersebut juga ada yang kembali kepada nelayan untuk mendukung kegiatan produksi.

**Kata Kunci:** biaya transaksi, rasio biaya transaksi dan penerimaan

**ABSTRACT**

*Economic efficiency is often measured mostly from production aspect but lack of non-production aspect, such as transaction cost. In small scale fisheries, fishers cover extra cost not only for production cost, thus lowering fisher income. This research was conducted to analyze transaction cost components and its impact to economic efficiency of small scale fisheries at Cilacap regency. The study was conducted by using the survey method and descriptive analysis. Results showed that auction fee in the landing site was the largest component of the transaction cost. It was 45% of the total transaction cost. The ratio of transaction cost and revenue indicates that each income Rp100, then of Rp. 26 used by others even though most of the cost of the transaction there is also a return to fisher to support production.*

**Keywords:** transaction cost, ratio of transaction cost and revenue

## PENDAHULUAN

Perikanan skala kecil merupakan subsektor yang sangat penting untuk Indonesia karena merupakan perikanan rakyat yang meliputi lebih dari 90 persen nelayan nasional. Karakteristik dan permasalahan pokok dalam perikanan rakyat ini adalah bahwa nelayan pantai umumnya tergolong pada lapisan masyarakat dengan pendapatan yang relatif rendah dibandingkan dengan kelompok petani atau kelompok pekerja lainnya. Nelayan pesisir ini selain menghadapi tingkat pendapatan yang relatif rendah dalam komunitasnya juga kekurangan atau tidak mempunyai alternatif lain dalam lapangan pekerjaan. Panayotou (1982) menjelaskan bahwa nelayan kecil tersebut, pada umumnya masuk pada kelompok masyarakat termiskin (*the poorest of the poor*).

Studi-studi mengenai kemiskinan nelayan memberikan gambaran yang jelas mengenai kehidupan masyarakat nelayan khususnya nelayan tradisional dan nelayan buruh. Suyanto (1996) menggambarkan bahwa kehidupan nelayan tradisional dan buruh nelayan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, dengan sedikit kegoncangan atau kebutuhan mendadak, mereka akan *collapse*. Faktor penyebabnya menurut Suyanto, adalah karena akumulasi faktor yang sangat kompleks, mulai dari faktor alam dan musim yang sulit ditebak, keteringgalan teknologi, kekurangan modal, tingkat pendidikan yang rendah, penghisapan dan posisi tawar-menawar yang lemah.

Hubungan antara perikanan dan kemiskinan sangat kompleks dan tidak selalu dipahami dengan baik (Bene and Friend, 2011). Dalam berbagai literatur dan diskursus kebijakan, hubungan ini sering disederhanakan sehingga tidak memungkinkan untuk mengembangkan respon yang tepat. Dalam menghadapi ketidakpastian nelayan mengembangkan jaringan sosial sebagai salah satu bentuk strategi dalam menghadapi lingkungan pekerjaannya (Kusnadi, 2000).

Permasalahan yang selalu dihadapi pemerintah dalam pembangunan perikanan skala kecil ini adalah bagaimana meningkatkan taraf kehidupan nelayan, sementara tetap harus mengupayakan kelangsungan hidup habitat dan populasi sumberdaya ikan sebagai sumberdaya alam, sekaligus menyediakan lahan bagi kehidupan atau mata pencaharian nelayan. Artinya pembangunan perikanan tidak hanya dihadapkan pada masalah biologi dan ekologi semata, tetapi

juga masalah sosial dan ekonomi masyarakat nelayan. Dengan demikian usaha perikanan ini perlu didukung oleh iklim usaha yang kondusif yang bisa memberikan insentif kepada nelayan dalam mengembangkan usahanya.

Dalam menjalankan aktivitas ekonominya, nelayan skala kecil juga tidak terlepas dari timbulnya biaya transaksi. Oleh karena hak kepemilikan selalu tidak pernah lengkap (*incomplete*) dan tidak pernah sempurna (*imperfect*) menyebabkan biaya transaksi akan selalu positif dan disinilah kelembagaan menjadi penting. Dapat dikatakan bahwa kelembagaan adalah fungsi dari biaya transaksi. Allen (1991) menyatakan secara tegas keterkaitan antara biaya transaksi dengan kelembagaan: “...when transaction costs are zero, then the institutional rules do not matter. When transaction costs are positive (which they always are) then institution have significant consequences for the allocation of resources.” Bentuk-bentuk kelembagaan itu sebenarnya adalah pilihan, dan pilihan yang ditetapkan tergantung dari bentuk kelembagaan mana yang paling dapat memaksimalkan keuntungan dari proses produksi di atas biaya transaksi yang harus dikeluarkan.

Kondisi kehidupan nelayan yang ditunjukkan dari tingkat kemiskinan yang dialaminya, ditambah seberapa besar biaya transaksi yang muncul membebani kehidupannya, merupakan aspek penting bagi keberlanjutan perikanan skala kecil. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghitung biaya transaksi yang dihadapi nelayan skala kecil di Kabupaten Cilacap dan menganalisis sejauh mana biaya transaksi tersebut mempengaruhi efisiensi ekonomi usaha perikanan skala kecil ini. Untuk mendapatkan nilai efisiensi ekonomi maka perlu diketahui juga komponen biaya investasi dan biaya produksi kegiatan nelayan skala kecil.

## METODOLOGI

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai dengan sampel sebanyak 50 orang nelayan yang dipilih secara acak pada 10 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pesisir Kabupaten Cilacap. Perikanan skala kecil yang menjadi objek penelitian adalah sebagaimana definisi tentang nelayan kecil yang tercantum pada Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada ayat 1 angka 12, yang mendefinisikan nelayan kecil adalah orang yang

mata pencahariaannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

## Metode Analisis

### A. Analisis Biaya Transaksi

Persamaan yang digunakan untuk menghitung biaya transaksi (TrC) adalah sebagai berikut :

$$\text{TrC} = \sum_{i=0}^n Z_i \dots\dots\dots 1)$$

Rasio masing-masing komponen biaya transaksi terhadap total biaya transaksi (z) dihitung dengan menggunakan persamaan :

$$Z_i = \frac{Z_i}{\text{TrC}_i} ; \sum Z_i = 1 \dots\dots\dots 2)$$

Tingkat efisiensi ekonomi usaha nelayan skala kecil dilihat dari angka rasio biaya transaksi terhadap penerimaan nelayan. Rasio biaya transaksi dan penerimaan dihitung dengan menggunakan persamaan :

$$\frac{z_i}{y_i} = \frac{\text{TrC}}{B} \dots\dots\dots 3)$$

Keterangan/ *Explanation* :

- $Z_i$  = Komponen Biaya Transaksi/  
*Transaction Cost Components*
- $Y_i$  = Total Produksi (Kg/Tahun)/ *Production*  
*Total (kg/year)*
- $\text{TrC}$  = Total Biaya Transaksi (Rp/tahun)/ *Total*  
*Transaction Cost (IDR/year)*
- $B$  = Penerimaan (Rp/tahun)/ *Revenue*  
*(IDR/year)*

Guna menentukan besarnya proporsi biaya transaksi terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh nelayan dalam kegiatan produksi, maka dihitung proporsi biaya transaksi terhadap total biaya yang dikeluarkan (penjumlahan biaya produksi dan biaya transaksi) dengan menggunakan persamaan :

$$\text{rtc} = \frac{\text{TrC}}{(\text{TC} + \text{TrC})} \dots\dots\dots 4)$$

Keterangan/ *Explanation* :

- $\text{rtc}$  = Rasio Biaya Transaksi Terhadap Total  
Biaya/ *Transaction Cost and Total Cost*  
*Ratio*

$$\text{TC} = \text{Biaya Total/ Total Cost}$$

### B. Biaya Investasi dan Biaya Produksi

Perhitungan biaya investasi dan biaya produksi dilakukan untuk mengetahui besarnya proporsi biaya transaksi terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan. Biaya investasi dan produksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan nelayan untuk memulai usahanya. Biaya investasi nelayan dihitung dari rata-rata nilai per unit kapal/perahu beserta alat tangkap yang dimiliki oleh responden nelayan. Sedangkan komponen biaya produksi terdiri dari biaya variabel (*variable cost*) dan biaya tetap (*fixed cost*). Komponen biaya variabel pada kegiatan produksi nelayan terdiri dari bahan bakar minyak, perlengkapan (es, air, umpan) dan upah tenaga kerja. Sedangkan biaya tetapnya adalah biaya perawatan dan perbaikan kapal beserta mesinnya. Persamaan yang digunakan untuk biaya variabel nelayan adalah :

$$\text{TC} = \sum_{i=0}^n C_i \dots\dots\dots 5)$$

Masing-masing komponen biaya produksi memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap total biaya produksi. Kontribusi tersebut dilihat berdasarkan rasio masing-masing komponen input terhadap total produksi (C) yang dihitung dengan cara :

$$C_i = \frac{C_i}{\text{TC}_i} ; \sum C_i = 1 \dots\dots\dots 6)$$

Selain rasio komponen input terhadap total biaya produksi ( $C_i$ ) juga dilakukan analisis biaya variabel rata-rata yang dihitung dengan menggunakan persamaan :

$$\text{AVC} = \frac{\text{TVC}}{Y} \dots\dots\dots 7)$$

Guna mengukur tingkat efisiensi ekonomi usaha penangkapan ikan, maka dihitung rasio biaya produksi terhadap penerimaan pertahun, dengan persamaan :

$$\frac{z_i}{y_i} = \frac{\text{TC}}{B} \dots\dots\dots 8)$$

Keterangan/ *Explanation* :

- $\text{TVC}$  = Total Biaya Variabel/ *Total Variable Cost*
- $\text{AVC}$  = Rata-rata Biaya Variabel/ *Average*  
*Variable Cost*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Biaya Investasi dan Struktur Biaya Produksi Perikanan Skala Kecil*

Kegiatan penangkapan ikan adalah suatu kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam perikanan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya perikanan dapat dipandang sebagai suatu komponen dari ekosistem perikanan berperan sebagai faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu output yang bernilai ekonomi masa kini maupun masa mendatang.

Rata-rata setiap rumah tangga nelayan skala kecil di Kabupaten Cilacap memiliki 1 perahu berukuran di bawah 5 GT dengan satu sampai tiga jenis alat tangkap berupa jaring dan pancing. Karena skala usahanya yang kecil, maka pilihan investasinya tidak banyak. Hal ini tergambarkan dengan pola dan teknologi yang hampir seragam untuk semua nelayan skala kecil di Kabupaten Cilacap, mulai dari teknologi alat tangkap, desain perahu dan pola operasionalnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Charles (2001) mengenai variabel yang membedakan nelayan skala kecil dan skala besar, salah satunya adalah pilihan investasi. Nelayan skala besar memiliki pilihan investasi yang lebih beragam dibanding nelayan artisanal. Faktor yang turut membatasi sedikitnya pilihan investasi ini adalah terbatasnya modal yang mereka miliki.

Total nilai investasi yang dibutuhkan oleh nelayan skala kecil di Kabupaten Cilacap mencapai Rp 18,6 juta rupiah, dimana biaya terbesar adalah untuk pembelian mesin. Usia pakai dari perahu di bawah 5 GT ini antara 5 sampai 6 tahun, tergantung pola pemakaian dan perawatan yang dilakukan (Tabel 1).

Selanjutnya biaya operasional dibutuhkan agar aktivitas penangkapan ikan dapat berlangsung. Biaya operasional (*operating cost*) adalah biaya-biaya tetap (*fixed cost*) yang dikeluarkan untuk aspek-aspek operasional sehari-hari perahu nelayan dengan tujuan untuk membuat perahu selalu dalam kondisi siap berlayar. Komponen-komponen penyusun biaya operasional dalam aktivitas nelayan skala kecil di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

- Biaya perbekalan (*provision cost*) adalah biaya untuk kebutuhan nelayan/ buruh (bahan makanan dan minuman).
- Biaya bahan bakar minyak (BBM). Bahan bakar yang digunakan untuk jenis mesin tempel adalah berupa premium dengan campuran oli.
- Biaya perawatan dan perbaikan (*maintenance and repair cost*) mencakup semua kebutuhan untuk mempertahankan kondisi kapal siap berlayar dan dapat melakukan operasi penangkapan ikan serta perbaikan alat tangkap.

Biaya perbekalan dan BBM dikeluarkan setiap dilakukannya operasional (trip) penangkapan ikan yang biasanya dilakukan dengan pola *one day fishing*. Total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 100.000 untuk perbekalan dan Rp 120.000 untuk BBM yang terdiri dari 20 liter premium @Rp 4.500 – 6.000 dan Rp 30.000 untuk 1 kaleng oli dalam setiap tripnya. Sedangkan untuk biaya perawatan, biasanya nelayan mengeluarkan rata-rata Rp 4.000.000 dalam setahun. Dari hasil wawancara diketahui rata-rata setahun nelayan melakukan 120 trip maka rata-rata biaya produksi yang harus dikeluarkan mencapai 30,4 juta per tahun (Tabel 2).

**Tabel 1. Rata-rata Biaya Investasi Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Cilacap.**

**Table 1. Investment Average of Small Scale Fisheries at Cilacap District.**

No	Komponen Investasi/ Investment Component	Vol/Vol	Nilai (Rp)/ Value (IDR)
1.	Perahu berbahan Fiberglass ukuran dibawah 5 GT/ <i>Fiberglass boat &lt; 5 GT</i>	1 unit	6,000,000,
2.	Mesin tempel ukuran 15-25 PK/ <i>Outboard 15-25 HP</i>	1 unit	10,000,000
3.	Alat tangkap ( <i>trammel net</i> )/ <i>Fishing gear (trammel net)</i>	18 pcs	1,620,000
4.	Lain-lain (tali tambat, jangkar, blong, dll)/ <i>Other (mooring ropes, anchors, holes, etc.)</i>	1 paket	1,000,000
<b>Jumlah/Total</b>			<b>18,620,000</b>

Sumber : Hasil Survei, 2013/*Source: Primary Data, 2013*

**Tabel 2. Rata-rata Biaya Produksi Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Cilacap.**  
**Table 2. Production Cost Average of Small Scale Fisheries at Cilacap District.**

No	Komponen Biaya Produksi/ Production Cost Component	Vol/ Vol	Nilai(Rp)/trip Value(IDR)/trip	Nilai(Rp)/tahun Value(IDR)/year
1.	Biaya BBM (trip/tahun)/ <i>Fuel (trip/year)</i>	120	120,000	14,400,000
2.	Perbekalan (trip/tahun)/ <i>Provision (trip/year)</i>	120	100,000	12,000,000
3.	Biaya perawatan kapal dan alat tangkap (Paket/tahun)/ <i>Maintenance (packs/year)</i>	1	-	4,000,000
<b>Jumlah/Total</b>			<b>220,000</b>	<b>30,400,000</b>

Sumber : Hasil Survei, 2013/Source: Primary Data, 2013

Selanjutnya jika dilihat biaya variabel rata-rata produksi diperoleh nilai sebesar Rp. 6,45 untuk menghasilkan setiap kg tangkapan. Sedangkan rasio total penerimaan nelayan dalam setahun terhadap biaya produksi diperoleh nilai 1,51 yang berarti rata-rata secara ekonomi usaha penangkapan ikan oleh nelayan skala kecil cukup efisien.

### **Struktur Biaya Transaksi Nelayan**

Skala usaha yang kecil dan sederhana pada nelayan yang memiliki armada penangkapan berukuran 5 GT ke bawah, menyebabkan komponen biaya transaksi yang terjadi juga relatif sedikit. Komponen yang teridentifikasi adalah : 1) biaya raman (retribusi penjualan di TPI), 2) biaya keamanan perahu dan 3) biaya sosial/ kontribusi untuk kelompok nelayan, dan 4) pelaksanaan tradisi laut (sedekah laut).

Komponen ini diidentifikasi berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para nelayan dalam kegiatan produksi sampai dengan pemasaran hasil tangkap baik yang dikeluarkan secara rutin dalam waktu yang singkat maupun dalam waktu tertentu (tahunan).

#### **1). Biaya Retribusi**

Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Peraturan Daerah (PERDA) No.7 Tahun 2009 tentang Retribusi tempat pelelangan Ikan, telah mengatur biaya retribusi sebesar 1,1% yang terdiri dari 0,6% ditanggung nelayan dan 0,5% ditanggung oleh bakul ikan dari setiap total penjualan di TPI. Namun dalam masa-masa paceklik, pengelola TPI tidak menetapkan retribusi sepenuhnya. Biaya yang ditagihkan kepada nelayan biasanya hanya 50% dari seharusnya yang dibayar oleh nelayan. Baru pada musim ikan saja biaya retribusi ini diterapkan sepenuhnya oleh TPI.

Berdasarkan hasil pengamatan di sembilan lokasi TPI yang menjadi basis nelayan kecil di Kabupaten Cilacap, biaya raman yang diterapkan umumnya lebih besar dari retribusi yang telah diatur dalam PERDA, yaitu sebesar 5 persen. Namun demikian sebagian besar dari pungutan raman tersebut pada dasarnya akan kembali ke nelayan dengan berbagai bentuk fasilitas, bantuan dan lainnya yang dapat diterima nelayan pada waktu-waktu tertentu. Rincian raman atau retribusi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Operasional produksi 0,2 %
2. Tabungan Nelayan 1,0 %
3. Tabungan bakul 0,25 %
4. Dana Sosial 0,5 %
5. Pengembangan KUD 0,45 %
6. Dana Paceklik 0,5 %
7. Asuransi 0,3 %
8. Administrasi lelang 1,5 %
9. Pengembangan TPI 0,2 %
10. Operasional HNSI 0,1%

Proses lelang hasil penangkapan ikan merupakan wujud dari mekanisme pasar, dimana pembeli dan penjual mencapai tingkat kesepakatan terhadap volume barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Proses lelang tidak terjadi begitu saja, namun melalui penyelenggaraan oleh pihak pengelola TPI. Untuk penyelenggaraan lelang tersebut, maka pihak penjual (nelayan) dan pembeli (bakul) dikenakan retribusi yang juga termasuk biaya transaksi. Hal ini sejalan dengan pemikiran neo-klasik yang dikemukakan oleh Coase (1937) bahwa biaya transaksi merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan mekanisme pasar.

Sepanjang tahun 2011 retribusi penjualan hasil perikanan yang dibayarkan oleh nelayan



mencapai Rp 1.935.012,15 dalam setahun. Sesuai dengan tipe biaya transaksi yang dikemukakan oleh North dan Thomas (1973), maka retribusi hasil tangkapan ini termasuk dalam tipe biaya pelaksanaan (*enforcement cost*), yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pertukaran barang dan uang antara penjual dan pembeli. Biaya pelaksanaan ini tidak bisa dihindari karena transaksi antara penjual dan pembeli terjadi karena adanya perantara atau pihak penyelenggara lelang. Walaupun retribusi ini dialokasikan untuk penerimaan daerah Kabupaten Cilacap dan biaya operasional koperasi, namun sebagian besar hasil retribusi kembali ke nelayan dalam bentuk fasilitas, pelayanan dan jasa.

## **2). Biaya Keamanan Perahu**

Biaya keamanan perahu muncul karena tidak adanya sarana tambat perahu yang menjamin keamanan bagi perahu/kapal di sepanjang pesisir pantai Kota Cilacap. Setelah selesai melaut, nelayan biasanya menarik perahu ke daratan dan meletakkan perahunya di pinggir pantai. Kemudian mesin tempel yang ada di perahu harus dibuka dan diangkat ke rumah atau tempat penyimpanan mesin, yang berjarak 200 meter sampai dengan 1 km dari pinggir pantai, tergantung lokasi pemukiman nelayan.

Menarik kapal ke daratan dan mengangkat mesin ke tempat penyimpanan biasanya dilakukan oleh buruh nelayan atau masyarakat sekitar dengan imbalan dari hasil tangkapan yang disisihkan atau lebih kurang setara dengan Rp 5.000-10.000. Dalam satu tahun diperkirakan biaya ini dikeluarkan oleh nelayan mencapai lebih kurang Rp 1.000.000, tergantung frekuensi melaut.

## **3). Biaya Sosial Untuk Kelompok**

Sebagai nelayan yang tergabung dalam suatu kelompok, maka rasa kepemilikan dan sosial yang tinggi dalam kelompok dicerminkan pada kontribusinya terhadap kelompok. Salah satu kontribusi tersebut dapat berbentuk sumbangan uang untuk menopang operasional kelompok. Kelompok-kelompok usaha perikanan di Kabupaten Cilacap jarang yang menetapkan iuran kelompok pada tingkatan nilai tertentu. Hal ini disebabkan karena dinamisnya hasil tangkapan ikan yang diperoleh serta ketidakpastian untuk mendapatkan hasil. Oleh karenanya biaya sosial yang diberikan untuk kas kelompok sangat tergantung pada hasil tangkapan yang diperoleh. Biasanya nelayan menyisihkan 1-2 kg dari total hasil tangkapannya

untuk disumbangkan kepada kelompok. Nilainya dapat berkisar antara Rp 5.000 – Rp 20.000, tergantung pada jenis dan nilai jual hasil tangkapannya atau rata-rata setahun mencapai Rp 1.250.000.

## **4). Biaya Tradisi Laut**

Tradisi Sedekah Laut merupakan ritual tahunan yang digelar nelayan di Kabupaten Cilacap setiap bulan Muharam atau Suro. Ritual ini merupakan wujud rasa syukur nelayan kepada Tuhan atas limpahan rezeki berupa hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh kelompok nelayan Sidakaya, Donan, Sentolokawat, Tegalkatilayu, Lengkong, Pandanarang, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Tritih Kulon, dan Kemiren. Selain itu, nelayan juga memohon kepada Tuhan untuk diberi keselamatan selama melaut. Kegiatan ini juga menjadi agenda Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dengan menggelarnya secara meriah yang dipusatkan di Pantai Teluk Penyu. Dalam hal ini, prosesi ritual Sedekah Laut diawali iring-iringan sesaji dari Pendopo Wijayakusuma Sakti menuju Pantai Teluk Penyu. Sesampainya di Pantai Teluk Penyu, sesaji tersebut dibawa menuju pantai selatan Pulau Nusakambangan untuk dilarung. Kendati demikian, sejumlah kelompok nelayan juga menggelar tradisi Sedekah Laut ini di daerah mereka masing-masing.

Upacara ini didahului dengan acara prosesi membawa sesaji (*jolen*) untuk dilarung ke tengah laut lepas dari Pantai Teluk Penyu Cilacap. Jolen merupakan sesaji berupa kepala kerbau dan makanan-makanan yang akan dilarung ke samudera. Prosesi dimulai dari dalam Pendopo Kabupaten Cilacap menuju arah Pantai Teluk Penyu dengan diiringi arak-arakan Jolen Tunggul dan diikuti jolen-jolen pengiring lainnya oleh peserta prosesi yang berpakaian adat tradisional nelayan. Setibanya di Pantai Teluk Penyu sesaji kemudian dipindahkan ke kapal nelayan yang telah dihias dengan hiasan warna-warni untuk dibuang ke tengah lautan di kawasan pulau kecil dekat Pulau Majethi.

Seluruh biaya penyelenggaraan upacara ritual sedekah laut saat ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap menyisihkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khusus untuk upacara ritual ini yang dialokasikan melalui Dinas Pariwisata. Pemerintah sedari dulu memang sangat mendukung dan mengapresiasi upacara ritual

sedekah laut, karena upacara ritual ini merupakan sebuah tradisi yang harus dipertahankan.

Disamping itu, segala biaya yang menyangkut kebutuhan pribadi maupun kelompok dalam pelaksanaan upacara berasal dari iuran anggota kelompok nelayan. Iuran untuk melaksanakan tradisi laut ini dapat dikatakan sebagai biaya transaksi, karena harus dibayarkan oleh para nelayan untuk menjaga kearifan lokal dan hubungan sosial antar nelayan di Kabupaten Cilacap. Biaya yang dikeluarkan oleh nelayan untuk tradisi laut ini secara individu mencapai Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000 setiap tahunnya, yang umumnya digunakan untuk menghias perahu masing-masing yang ikut berlayar menebar saji ke tengah laut.

### Pengaruh Biaya Transaksi terhadap Efisiensi Usaha Penangkapan ikan

Besarnya biaya transaksi yang ditanggung oleh nelayan mencerminkan tingkat efisiensi ekonomi dari usaha penangkapan ikan yang dilakukan. Total rata-rata biaya transaksi yang harus dikeluarkan nelayan skala kecil di Kabupaten Cilacap mencapai Rp 4.285.012 setiap tahunnya. Nilai terbesar bersumber dari nilai raman atau pungutan pelelangan yang diselenggarakan di TPI.

Total rata-rata penerimaan nelayan setiap tahun mencapai Rp 45.807.555. Nilai ini diperoleh dari penjualan hasil tangkapan utama (udang) dengan harga rata-rata Rp 17.430 per kg dan tangkapan ikan dengan harga rata-rata Rp 7.554. Rata-rata hasil tangkapan setiap trip mencapai 18 kg udang dan 9 kg ikan serta rata-rata trip perbulan mencapai 10 kali (120 trip setahun). Setelah nilai ini dikurangi biaya produksi (biaya operasional dan perawatan), maka pendapatan bersih nelayan pertahun menjadi Rp 15.407.555.

Dilihat dari rasio biaya transaksi terhadap penerimaan, maka diperoleh nilai sebesar 0,26. Hal ini berarti setiap penerimaan Rp 100 nelayan skala kecil di Kabupaten Cilacap menanggung biaya sebesar Rp 26,00 atau 26% dari penerimaan nelayan dinikmati oleh pihak lain, namun tidak tertutup kemungkinan sebagian dari 26% tersebut kembali kepada nelayan dalam bentuk tabungan nelayan dan bantuan musim paceklik. Dengan demikian jika dilihat dari efisiensi ekonomi usaha biaya transaksi menurunkan nilai rasio efisiensi dari 1,51 menjadi 1,32. Jika ditambah dengan peluang terjadinya *economic shock* seperti naiknya biaya produksi akibat kenaikan BBM, maka rasio efisiensi akan bergerak menuju nilai 1 yang berarti usaha perikanan menuju titik impas atau bahkan menuju usaha yang tidak efisien.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan biaya transaksi yang terdapat pada kegiatan perikanan skala kecil di perairan pesisir Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

1. Biaya investasi bagi nelayan skala kecil di Kabupaten Cilacap mencapai Rp 18.620.000 dengan rata-rata biaya produksi dalam setahun mencapai Rp. 30.400.000.
2. Biaya transaksi yang muncul dari aktivitas perikanan skala kecil di Kabupaten Cilacap pada dasarnya tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir agar efisiensi usaha dapat meningkat. Retribusi lelang di TPI saat ini merupakan komponen biaya transaksi terbesar, yaitu mencapai Rp 1.935.012 pada tahun 2011.

**Tabel 3. Komponen Biaya Transaksi Nelayan Skala Kecil di Kabupaten Cilacap.**  
**Table 3. Transaction Cost Component of Small Scale Fisheries at Cilacap District.**

No	Komponen Biaya Transaksi/ Transaction Cost Variables	Nilai (Rp)/ Value (IDR)	Persentase/ Percentage (%)
1.	Biaya Raman/Auction fee	1,935,012	45.16
2.	Biaya keamanan perahu/Boat Security fee	1,000,000	23.34
3.	Iuran kelompok usaha/Fisher Group fee	1,250,000	29.17
4.	Tradisi sedekah Laut/Cultural Ritual fee	100,000	2.33
<b>Jumlah/Total</b>		<b>4,285,012</b>	

Sumber : Hasil Survei, 2013/Source: Primary Data, 2013

3. Rasio biaya transaksi terhadap penerimaan nelayan skala kecil mencapai 0,26 atau rata-rata sebesar 26% dari Rp 100 yang diterima nelayan. Hal ini cukup signifikan menyebabkan berkurangnya penerimaan bersih oleh nelayan.

#### **Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan dalam tata kelola pembangunan perikanan khususnya bagi nelayan skala kecil di Kabupaten Cilacap, perlu memperhatikan manajemen kelembagaan seperti koperasi, yang mengelola retribusi lelang sebagai komponen terbesar biaya transaksi, agar keuntungan koperasi dapat memberikan manfaat balik sebesar mungkin kepada nelayan skala kecil seperti subsidi modal dan subsidi musim paceklik, agar efisiensi usahanya meningkat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Allen, D. W. 1991. *What Are Transaction Cost?* London: JAI Press Inc.
- Bene, C., and R.M. Friend. 2011. *Poverty in Small-Scale Fisheries: Old Issue, New Analysis*. *Progress in Development Studies*, 11(2): pp.119-144
- Charles, A. T. 2001. *Sustainable Fisheries System*. Wiley-Blackwell. 370 hal
- Coase, R. 1937. "The Nature of the Firm". *Economica* (Blackwell Publishing) 4 (16): 386-405
- Kusnadi. 2000. *Nelayan: Strategi adaptasi dan jaringan sosial*. Humaniora Utama Press Bandung. Bandung.
- North, D. C., and P. T. Robert. 1973. *The Rise of the Western World: A New Economic History*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Panayotou, T. 1982. *Management Concept fo Small-Scale Fisheries: Economic and Social Aspect*. FAU-UN. Rome. 53 hal.
- Suyanto, B. 1996. *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*. Aditya Media. Yogyakarta.